- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15, Noreg Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta: 15/370/2016), Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa;
10. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1510/KEP/2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tahun Pelajaran 2021/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 1511/KEPKA/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DARING/*ONLINE* SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2022/2023.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1511/KEPKA/2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Peserta Didikbaru (PPDB) Daring/*Online* Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2022/2023 diubah sebagai berikut:

1. Pada angka I. Ketentuan Umum ditambahkan huruf Y sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Y. Akreditasi sekolah adalah pengakuan dari hasil proses evaluasi dan penilaian mutu pengelolaan sekolah yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat/tim asesor yang tergabung dalam Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan;
2. Pada angka IV. Ketentuan PPDB Online huruf A. Jalur Zonasi nomor 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
17. Proses pendataan calon peserta didik jalur zonasi radius tempat tinggal diatur sebagai berikut:
- a. Dilaksanakan secara daring/*online* melalui laman <https://ppdb.jogjaprov.go.id>
 - b. Calon peserta didik memasukkan data titik koordinat rumah, foto rumah tempat tinggal (tampak depan), dan surat pernyataan bermaterai yang membuktikan bahwa calon peserta didik telah tinggal dengan orang tua/wali lebih dari 1 (satu) tahun atau sebelum 30 Juni 2021 dengan diketahui ketua RT/RW setempat.
 - c. Calon peserta didik menunggu hasil validasi dari panitia Dinas DIY dengan terus memantau proses pengajuan di laman verifikasi.
3. Pada angka IV. Ketentuan PPDB Online huruf H. Penentuan Urutan Seleksi Reguler nomor 1. SMAN huruf b nomor 1) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
- b. Jalur Afirmasi
- Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:
- 1) Nilai gabungan;
 - 2) Prioritas pilihan peminatan/sekolah; dan
 - 3) Pendaftar lebih awal.
4. Pada angka IV. Ketentuan PPDB Online huruf H. Penentuan Urutan Seleksi Reguler nomor 2. SMKN huruf b nomor 1) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
- b. Jalur Afirmasi
- Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:
- 1) Nilai gabungan;
 - 2) Prioritas pilihan peminatan/sekolah; dan
 - 3) Pendaftar lebih awal.
5. Pada angka IV. Ketentuan PPDB Online huruf J. Daya Tampung Sekolah ditambahkan angka 3 dan angka 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Daya tampung peserta didik baru SMAN dan SMKN Sistem Daring/*Online* sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 huruf A dan B.
 2. PPDB SMAN dan SMKN memberikan kesempatan bagi pendaftar anak

berkebutuhan khusus dalam kelas inklusi maksimal 2 (dua) siswa setiap rombongan belajar dengan seleksi tersendiri yang merupakan bagian dari kuota jalur afirmasi.

3. Satuan pendidikan jenjang SMA yg ditetapkan sebagai satuan pendidikan berstatus Implementasi Kurikulum Merdeka, daya tampung dalam PPDB masih menggunakan pilihan peminatan IPA dan IPS.
4. Implementasi kurikulum merdeka pada sekolah yang ditetapkan sebagaimana angka 3 diatur lebih lanjut oleh satuan pendidikan jenjang SMA Negeri setelah pelaksanaan PPDB.

Pasal 2

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1511/KEPKA/2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Daring/*Online* Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2022/2023 diubah sebagai berikut:

1. Pada huruf A. Titik Koordinat SMA Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor 2. SMA Negeri 2 Yogyakarta yang semula -7.77704,110.36736 menjadi **-7.778063, 110.353038**.
2. Pada huruf A. Titik Koordinat SMA Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor 5. SMA Negeri 5 Yogyakarta yang semula -7.8222914,110.3992172 menjadi **-7.822465,110.399380**.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 8 Juni 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA,
DAN OLAMRAGA DIY
DISDIKPOR
DIDIK WARDAYA, SE, M.Pd.
NIP. 19660530 198602 1 002